

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Korea Utara (Korut) atau secara resmi disebut *Democratic People's of Korea* adalah salah satu negara di wilayah Asia Timur yang terletak di selatan daratan Tiongkok, Rusia di bagian utara, Laut Timur Jepang di bagian timur, Korea Selatan di bagian selatan, dan Laut Kuning di bagian barat<sup>1</sup>. Negara yang dipimpin oleh Kim Jong Un ini dihuni oleh sekitar 25.248.140 jiwa dengan luas wilayah sekitar 120,538 km<sup>2</sup> beribu kota di Pyongyang.

Korut adalah negara yang sejak awal berdiri hingga kini berada dibawah kepemimpinan dinasti Kim. Pemimpin pertama Korut adalah Presiden Kim Il Sung, yang memerintah sejak 1948 hingga tahun 1994 yang merupakan tahun wafatnya. Kim Il Sung mendapatkan gelar sebagai Pemimpin Abadi Korut. Ia tetap dihormati sebagai pemimpin tertinggi Korut meskipun kepemimpinannya sudah diwariskan pada keturunannya atau penerusnya, masih dipuja atau dikultuskan oleh seluruh masyarakat Korut bahkan tempat kelahirannya di Mangyungdae menjadi tempat suci untuk berziarah. Kim Il Sung tentunya tetap hidup dalam ideologi nasional *Juche* yang dianut oleh Korut. Ideologi ini diciptakan oleh Kim Il Sung yang mana dalam ideologi ini menyatakan bahwa manusia menguasai dan menentukan segalanya.

Setelah wafatnya Kim Il Sung, kepemimpinannya diturunkan kepada anaknya yaitu Kim Jong Il yang memerintah hingga tahun 2011.

---

<sup>1</sup> Embassy of The Republic of Indonesia in Pyongyang, Democratic People's of Korea, "*Korea Utara*", Pyongyang, 2015, dikutip dari <https://bit.ly/2SGMqSy>, pada 2 November 2018

Semasa pemerintahannya, Presiden Kim Jong Il menciptakan ideologi tambahan yang mendukung dan memperkuat ideologi *Juche* yang sebelumnya yaitu ideologi *Songun*. Ideologi ini berprinsip pada “*military first*” dalam setiap segi kehidupan bernegara. Setelah kematian Presiden Kim Jong Il pada 17 Desember 2011 tahta kepemimpinan Korut dialihkan pada putranya Kim Jong Il yang masih memimpin Korut hingga kini.

Negara dengan kepemimpinan yang diktator ini sangat terisolasi dari dunia luar. Pemimpin tertinggi negara mengendalikan segala sistem yang ada di negara tersebut.

Sejarah Korut sendiri dimulai pada PD II (Pasca Perang Dunia II). Sebelum terpecah menjadi dua Korea yang kala itu dikenal dengan nama Dinasti *Jeoson* mengalami masa penjajahan kurang lebih selama 35 tahun oleh Jepang yang pada saat itu mulai menduduki wilayah Korea pada tahun 1910 dan Korea pun merdeka pada tahun 1945. Tidak lama setelah merdeka, tepatnya pasca PD II wilayah Korea segera terpecah menjadi dua pada garis 38 derajat. PD II yang kita ketahui sebagai perang ideologi antara Uni Soviet (US) sebagai blok Timur yang mewakili ideologi sosial komunis dan Amerika Serikat (AS) sebagai blok Barat yang mewakili ideologi demokrasi liberal. Kedua negara tersebut saling memperebutkan pengaruh di wilayah Semenanjung Korea, sehingga wilayah tersebut berada di bawah dua pemerintahan yang berbeda ideologi. Semenanjung Korea berada dalam masa pengawasan negara-negara pemenang PD II tiga tahun lamanya. Hal ini menimbulkan ketegangan dalam wilayah Korea mengenai perbedaan antara demokrasi dan komunisme. Wilayah utara berada di bawah pengawasan pasukan US dengan memberikan dukungan positif pada Kim Il-Sung seorang kapten Pasukan Merah US untuk mendirikan

pemerintahan komunis pada tahun 1948 dengan nama Republik Rakyat Demokrat Korea (Korut). Sedangkan di wilayah selatan, Rhee Syng-Man seorang doktor yang telah mendapat gelarnya dari AS mendirikan pemerintahan pro-AS dengan nama Republik Korea (Korsel) ditahun yang sama. Disinilah awal mula terpecahnya wilayah Semenanjung Korea, yang kemudian juga menimbulkan perang saudara di wilayah tersebut pada tahun 1950. Korut berkonflik dengan Korsel selama 68 tahun, sejak saat itu Semenanjung Korea menjadi salah satu daerah dari simbol Perang Dingin.

Mengenai konflik antara Korut dan Korsel pada tahun 1953 telah diadakan perundingan namun hal ini tetap saja tidak dapat menghentikan konflik yang terjadi, karena tidak ada kesepakatan untuk perdamaian melainkan hanya sekedar kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata. Pertemuan bersejarah antara pemimpin Korut Kim Jong-Il dengan presiden Korsel Kim Dae-Jung pernah diadakan pada 15 Juni 2000, yang kemudian menghasilkan deklarasi bersama antarKorea. Hal ini bahkan memberikan kesempatan bagi antarKorea dalam melakukan kerjasama, namun dikarenakan prinsip "*military-first*" yang dipegang teguh oleh Korut membatasi lingkup kerjasama tersebut<sup>2</sup>. Isu-isu militer yang terjadi antara Korut dan AS juga menjadi tantangan yang sangat serius dalam kestabilan hubungan kerjasama antarKorea. Meskipun dapat dikatakan kerjasama antarKorea kala itu memberikan hasil yang nyata dan memberikan banyak arti namun karena pesatnya perubahan yang terjadi atas hubungan antarKorea justru menimbulkan berbagai masalah baru antara

---

<sup>2</sup> Tae-Hwan & Seung-Ho, "*North Korea's Foreign Policy under Kim Jong Il: New Perspectives*", London: Routledge, 2009, hal. 231

keduanya. Hal tersebut membuat hubungan antarKorea tidak dapat bertahan lama.

Perundingan damai sering kali dilakukan namun usaha tersebut tetap tidak membuahkan hasil. Berbagai masalah terus muncul antara kedua Korea tersebut. Sikap agresif dari Korut terutama mengenai proliferasi nuklir sering memunculkan reaksi dari Korsel yang menyebabkan mereka terus berkonflik.

Namun kabar mengejutkan datang dari Korut pada awal tahun 2018. Dalam pidato penyambutan tahun baru, Kim Jong Un sebagai pemimpin tertinggi Korut menyatakan keinginannya untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Olimpiade Musim Dingin di Pyongchang yang diselenggarakan oleh Korsel pada tahun 2018<sup>3</sup>. Kemudian hal ini pun disambut baik oleh Presiden Korsel, Moon Jae In.

Keikutsertaan Korut dalam olimpiade ini memang bukanlah yang pertama kalinya. Sejarah keikutsertaan Korut dalam pagelaran olimpiade dimulai pada tahun 1964, yaitu pada Olimpiade Musim Dingin ke-9 yang diselenggarakan di Innsbruck, Austria.

Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018 diselenggarakan pada 9 Februari. Pada Olimpiade Musim Dingin ini digelar pertandingan olahraga yang berupa permainan-permainan yang biasa dimainkan pada daerah yang beriklim dingin. Permainan yang ada pada ajang Olimpiade Musim Dingin pada awalnya adalah *Nordic Games* atau merupakan permainan olahraga yang diselenggarakan oleh negara-negara Skandinavia dalam empat tahun sekali,

---

<sup>3</sup> Kim Jong Un, *Kim Jong Un's 2018 New Year's Address*, DPRK Government Documents, 2018, dikutip dari <https://bit.ly/2qnqoaz>, pada 2018

dimulai pada tahun 1901 di Swedia<sup>4</sup>. Pada perhelatan lomba tersebut hanya diikuti oleh perwakilan-atlet dari negara-negara Skandinavia. Olimpiade Musim dingin ini pertama kali diadakan secara resmi pada tahun 1928 di Swiss, yang kemudian diselenggarakan dalam empat tahun sekali secara rutin hingga kini<sup>5</sup>, setelah mendapat persetujuan dari IOC sebagai Pekan Olahraga Musim Dingin Internasional pada tahun 1924.

Pada tahun 2018 ini tetangga dekat Korut yaitu Korsel mendapatkan kesempatan sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan Olimpiade Musim Dingin yang ke-23. Pada sidang IOC ke 123 yang diselenggarakan pada 6 Juli 2011 di Afrika Selatan, Korsel mendapat suara terbanyak yaitu 63 suara yang membuat Korsel keluar sebagai negara terpilih untuk menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Dingin 2018<sup>6</sup>. Dalam Olimpiade Musim Dingin 2018 ini terdapat 102 nomor pada 15 cabang olahraga yang melibatkan 2.920 partisipan dari 92 negara dan Korut untuk pertama kalinya mengirimkan delegasi dalam jumlah banyak yaitu sekitar 22 pemain, 229 *cheerleaders*, dan 27 pejabat tinggi Korut<sup>7</sup>.

Meskipun dalam Olimpiade Pyeongchang 2018 ini Korut tidak mampu membawa pulang gelar juara, namun keikut sertaannya menjadi sorotan dari banyak pihak. Jika melihat kembali pada sejarah sebelumnya, bahwa ini bukan kali pertama tetangga Korut tersebut

---

<sup>4</sup> The Editor of Encyclopedia Britannica, "*Origins Of The Olympic Winter Games*", Encyclopedia Britannica, 2011, dikutip dari <https://www.britannica.com.html>, pada 14 Oktober 2018

<sup>5</sup> *Loc. cit*, The Editor of Encyclopedia Britannica.

<sup>6</sup> Editor Korean Cultural Center, "*Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018*", Korean Cultural Center, dikutip dari <http://id.korean-culture.org.html>, pada 14 Oktober 2018

<sup>7</sup> *Ibid*.

yaitu Korsel menjadi tuan rumah dari ajang perhelatan Olimpiade dunia. Namun sebelumnya Korsel untuk pertama kalinya pernah menjadi tuan rumah dalam ajang Olimpiade Musim Panas ke-24 yang diadakan pada 1988 di Seoul<sup>8</sup>. Yang berarti kedua Olimpiade tersebut sama-sama pernah diselenggarakan di Korsel namun Korut hanya berpartisipasi pada Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018, tetapi tidak berpartisipasi pada ajang Olimpiade Musim Panas Seoul 1988. Korut bahkan disaat itu melakukan pemboikotan atas Olimpiade Musim Panas Seoul bersama dengan beberapa negara yang dekat dengannya seperti Nikaragua, Madagaskar, Albania, Kuba, Ethiopia, dan Seychelles<sup>9</sup>.

Keikutsertaannya kali ini menjadi sangat tidak biasa dan menimbulkan banyak spekulasi dari berbagai pihak. Korut berani untuk mengambil langkah tersebut, dibalik keraguan dan kekhawatiran dunia internasional atas komitmennya dalam keikutsertaan tersebut pasca uji coba nuklir yang dilakukan Korut terakhir kali di akhir tahun 2017. Terlebih lagi jika melihat kondisi yang saat ini sedang dialami oleh Korut yang mana Korut sedang dijatuhi banyak sanksi internasional terkait kegiatan proliferasi senjata nuklirnya. Sanksi tersebut menunjukkan adanya rasa ketidak amanan dunia internasional atas tindakan Korut yang kerap agresif dan mengancam kestabilan dunia internasional dengan keberadaan senjata nuklirnya. Alhasil Korut selalu dikaitkan sebagai negara yang dapat menjadi pemicu munculnya perang dunia III, citra Korut di mata negara-negara dunia kian menurun. Hal tersebut dapat dilihat dari

---

<sup>8</sup> Catur Ratna Wulandari, *Korea Utara Boikot Olimpiade Seoul 1988*, Pikiran Rakyat, 2017, dikutip dari <https://bit.ly/2qo7ikL>, pada Oktober 2018

<sup>9</sup> *Ibid.*

banyaknya negara-negara yang ikut menjatuhkan sanksi pada Korut dan mendukung berbagai Resolusi dari PBB terkait sanksi untuk Korut seperti negara-negara besar yang sangat berpengaruh pada dunia internasional yaitu diantaranya Amerika, Tiongkok, Korsel, Jepang, Inggris, Australia, dan Kanada.

Selain embargo senjata yang diberlakukan pada Korut, sanksi ekonomi adalah sanksi berat yang dapat menghentikan kegiatan proliferasi dan uji coba senjata nuklir Korut. Berbagai sektor yang dapat menjadi sumber modal bagi Korut untuk melakukan kegiatan proliferasi senjata nuklir menjadi sasaran, diantaranya adalah penutupan badan-badan usaha asal Korut, pembatasan bahkan penghentian kegiatan ekspor-impor hasil produksi atau bahan mentah untuk produksi dengan Korut diberbagai sektor (tekstil, manufaktur, mineral, minyak, agrikultur, makanan).

DK PBB (Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa) memberlakukan sanksi pada Korut pada 2006 yang tertuang pada Resolusi 1718 sehubungan dengan kegiatan uji coba senjata nuklir Korut yang pertama kalinya di tahun yang sama, Resolusi 1874 pada 2009, Resolusi 1928 pada 2010, Resolusi 1985 pada 2011, Resolusi 2087 dan 2094 pada 2013, Resolusi 2270 dan 2320 pada 2016, Resolusi 2375 pada 2017<sup>10</sup>.

Keikutsertaan Korut dalam Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018 ini juga terbilang sangat berani, mengingat kondisi ekonomi Korut saat ini berada dalam kondisi yang sedang tidak stabil akibat dari sanksi ekonomi yang menjeratnya terkait kegiatan uji coba nuklirnya. PDB Korut pada tahun 2017

---

<sup>10</sup> Nur Afyah Isnaeni, "Dampak Program Pengembangan Nuklir Korea Utara Terhadap Hubungan Bilateralnya Dengan Tiongkok Tahun 2013-2015", Semarang: Journal of International Relations, 2017, vol. 3, hal. 49-55

menurun sebesar 3,5 persen dari tahun 2016. Mengingat untuk ikutserta dalam olimpiade tersebut tentu saja negara membutuhkan banyak modal untuk membiayai atlet-atlet dan delegasi-delegasi lain dari negara tersebut.

## **B. Tujuan Penelitian**

Sarana umum tujuan penelitian ini adalah :

1. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada jurusan Hubungan Internasional, fakultas Sosial Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mendorong Korut memutuskan untuk bergabung dalam ajang olahraga Olimpiade Pyeongchang 2018.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya mengenai hubungan Korea Utara dengan Korea Selatan, maka pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah: “faktor-faktor apa yang mendorong partisipasi Korut pada Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018?”

## **D. Kerangka Pemikiran**

Untuk dapat membantu menganalisa serta memberikan jawaban dari permasalahan yang ada, maka digunakan konsep Kepentingan Nasional dan Model Pengambilan Keputusan Luar Negeri.

### **1. Konsep Kepentingan Nasional**

Dalam hubungan internasional, *kepentingan nasional* merupakan salah satu faktor yang mendasar untuk melakukan interaksi antar negara. Kepentingan nasional adalah penentu ke mana arah politik luar negeri suatu negara akan



melaju<sup>11</sup>. Kepentingan nasional dapat mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Sehingga untuk menjelaskan dan memahami perilaku serta tindakan luar negeri suatu negara dapat menggunakan konsep kepentingan nasional.

Kepentingan nasional suatu negara tentunya tidak mampu dipenuhi oleh suatu negara secara mandiri tanpa ada bantuan dari pihak luar, suatu negara harus mampu mempertahankan kepentingan nasionalnya dalam melakukan interaksi dengan negara lain demi kesejahteraan negaranya. Dalam kepentingan nasional terdapat unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling penting demi kesejahteraan negaranya, seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi<sup>12</sup>.

Menurut *Padel Ford dan Lincoln*, kepentingan nasional tersusun atas 4 kepentingan utama yang menyangkut kesejahteraan negaranya yaitu: 1. *Kepentingan keamanan nasional*; 2. *Kepentingan pengembangan ekonomi*; 3. *Kepentingan peningkatan kekuatan nasional*; 4. *Kepentingan prestise nasional*.<sup>13</sup>

Kemudian penulis melalui pemikiran di atas hanya akan menganalisa dan melihat isu keikutsertaan Korut dalam Olimpiade Pyongchang 2018 tersebut dari dua unsur kepentingan yaitu

---

<sup>11</sup> Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005, hal. 35

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Norman J. Padelford dan George A. Lincoln, *International Politics*, New York: The Macmillan Company, 1962, hlm. 306

dari sisi kepentingan pengembangan ekonomi dan kepentingan prestise nasional.

Keikutsertaan Korut dalam Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018 menjadi momen yang paling menyita perhatian publik internasional diawal tahun 2018 dan menjadi perbincangan banyak media massa. Begitu banyak spekulasi, pendapat, bahkan kecurigaan yang muncul atas keikutsertaan Korut dalam ajang ini. Keikutsertaan Korut dalam ajang tersebut bukan tanpa maksud dan tujuan. Berpartisipasi dalam ajang tersebut tentunya merupakan hasil pertimbangan yang berdasarkan pada keadaan internalnya dan pertimbangan dari kepentingan-kepentingan dalam negerinya. Jika dianalisa dari data-data dan fakta yang ada bahwa berikut kepentingan Korut yang menjadi faktor pendorong dalam berpartisipasi di Olimpiade Pyeonchang 2018, yaitu:

### **1. Prestise nasional**

Kegiatan proliferasi dan uji coba senjata nuklir yang dilakukan oleh Korut selalu menjadi ancaman bagi dunia internasional, karena dapat mengganggu stabilitas keamanan dunia internasional itu sendiri sehingga Korut kerap dianggap sebagai negara yang berbahaya terutama bagi negara-negara tetangganya yang secara geografis dekat dengan Korut.

Dalam isu ini Korut menjadikan Olimpiade Pyongchang 2018 sebagai alat untuk memperbaiki dan meningkatkan prestise nasionalnya, yang mana melalui keikutsertaannya dalam Olimpiade ini akan memberikan citra baik atau pandangan positif terhadap Korut yang selama ini selalu dianggap sangat agresif dan cenderung

menggunakan *hard power*. Jika dilihat dari IOC mengenai tujuan Gerakan Olimpiade ini sendiri adalah berkontribusi untuk membangun dunia yang damai dan lebih baik dengan mengedukasi pemuda-pemudi melalui olahraga yang kemudian dipraktekkan tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun serta dalam semangat Olimpiade<sup>14</sup>. Tentunya hal-hal ini sangat dibutuhkan adanya rasa saling pengertian dengan semangat persahabatan, solidaritas, dan *fair play*<sup>15</sup>. Dalam hal ini mencoba untuk mengkomposisikan olahraga dengan edukasi dan kebudayaan. Terkait hal ini secara tidak langsung keikutsertaan Korut dalam Olimpiade Pyeongchang 2018 memberikan citra kepada Korut bahwa negara tersebut memiliki langkah untuk ikut berkontribusi dalam mewujudkan hal tersebut, karena nilai-nilai maupun tujuan yang tertanam dalam Gerakan Olimpiade tersebut akan diterapkan oleh seluruh partisipan dan tidak terkecuali Korut.

Hal tersebut akan menggiring opini masyarakat internasional mengenai Korut ke hal dan harapan yang lebih positif. Korut melalui ajang olimpiade ini melakukan *image building* untuk mendapatkan kepercayaan dari dunia internasional mengenai inisiatifnya untuk mengambil langkah perdamaian dengan Korsel serta dapat merubah pandangan negara-negara

---

<sup>14</sup> The Editor of Internasional Olympic Committee, "*Promote Olympism in Society*", Internasional Olympic Committee, dikutip dari <https://www.olympic.org.html>, pada 14 Oktober 2018

<sup>15</sup> *Ibid.*

dunia mengenai sikap agresif Korut selama ini. Hal ini terkait untuk mendapatkan kepercayaan dari Korsel, sehingga memudahkan untuk melakukan kerjasama terutama dalam bidang ekonomi yang sedang dibutuhkan oleh Korut.

## **2. Kepentingan ekonomi**

Akibat uji coba nuklir yang kerap dilakukan Korut sejak tahun 2006, berbagai sanksi dijatuhkan kepada Korut baik dari internasional oleh DK PBB maupun sanksi tambahan atau khusus dari berbagai negara yang merasa perlu untuk menerapkan sanksi tersebut kepada Korut. Sanksi ekonomi adalah salah satu sanksi terberat yang dijatuhkan kepada negara tersebut. Akibat sanksi ekonomi yang dijatuhkan padanya, PDB Korut pada tahun 2017 menurun sebesar 3,5 persen dari 2016.

Keikutsertaannya dalam Olimpiade Pyongchang 2018 ini membuahkan hasil. Langkah yang diambil oleh Korut untuk ikutserta dalam olimpiade tersebut secara tidak langsung membuka kembali pintu kerjasama bagi Korut dengan Korsel. Bahkan antarKorea mulai mengarah pada kerjasama ekonomi, yang mana hal ini tentunya dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak terutama bagi perkembangan ekonomi Korut yang sedang mengalami ketidakstabilan akibat sanksi ekonomi yang menjerat. Seperti pada pertemuan tingkat tinggi pemimpin antarKorea pada 19 September 2018 menyepakati untuk segera menormalisasikan kompleks Industri Gaesong dan proyek

pariwisata Kumgang<sup>16</sup> yang sebelumnya ditutup karena semakin meningkatnya ketegangan hubungan antara Dua Korea.

## 2. Model Pengambilan Keputusan Luar Negeri

Model pengambilan keputusan menurut William D. Coplin adalah:

*To be interested in why states behave as they do interest area, we have to be interested in why their leaders make the decision. However, it would be mistake to think that foreign policy makers act in vacuum. On the contrary, any given foreign policy act may be viewed as the result of three board categories of considerations affecting the foreign policy decision makers state. The first is domestic politics within the foreign policy decision makers states. The second is economy and military capability of the state. The third is the international contex the particular position in which his state finds it self specially in relation to other state in system.*<sup>17</sup>

Menurut *William D. Coplin* dalam model pengambilan keputusan dan kebijaksanaan politik luar negeri terdapat tiga faktor utama sebagai penentunya, yaitu: 1. *kondisi politik dalam negeri*; 2. *kapabilitas ekonomi dan militer*; 3. *konteks internasional*.

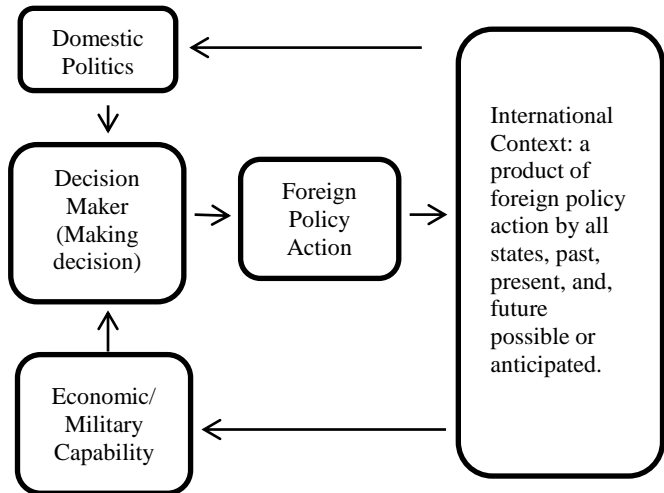
---

<sup>16</sup> MAJW, "Hasil Pertemuan Korea Utara & Korea Selatan: Sepakati Era Tanpa Perang" Retrieved Oktober 2018, from IDN Times: <https://www.idntimes.com.html>

<sup>17</sup> William D. Coplin, *pengantar politik internasional: Suatu Telaah Teoritities CV.sinar baru, Bandung 1992*, hal 30

Penjelasan mengenai model pengambilan keputusan menurut Coplin akan lebih terperinci melalui bagan di bawah ini :

### **Bagan 1.1 Model Pembuatan Kebijakan Luar Negeri Coplin**



Sumber: William D. Coplin, Pengantar Politik Internasional: *suatu telaah teoritis*. CV sinar baru, Bandung 1992

#### **a. Kondisi politik dalam negeri**

Keputusan luar negeri adalah refleksi dari kondisi politik dalam negeri suatu negara. Dengan kata lain keputusan luar negeri merupakan *output* dari proses interaksi politik dalam negeri yang dalam proses tersebut melibatkan para aktor-aktor politik yang berusaha untuk mempengaruhi pengambil kebijakan atau Coplin menyebut aktor-aktor tersebut sebagai "*policy influncer*". *Policy influncer* inilah yang menjadi sumber dukungan bagi rezim tertentu. Rezim yang memerintah suatu negara membutuhkan dukungan untuk

memastikan kedudukannya dan setiap kebijakan yang diambil tepat pada sasaran sehingga dapat memperkuat legitimasinya. Menurut Coplin *policy influncer* terbagi menjadi *bureaucratic influncer*, *partisan influncer*, *interest influncer*, dan *mass influncer*.

Untuk kehidupan perpolitikan Korut dipegang oleh satu partai yaitu Partai Buruh Korea (PBK) di bawah kekuasaan tunggal pemimpin tertinggi negara yang diwariskan dari dinasti Kim pada setiap generasinya yang kini dipegang oleh Kim Jong Un. Presiden Kim Jong Un juga sekaligus merupakan Sekretaris Utama dari PBK. PBK menduduki posisi teratas dalam struktur kekuatan nasional Korut yang menguasai kekuatan legislatif, administratif, serta yudikatif. Bahkan PBK juga menguasai segala lini kehidupan di Korut seperti organisasi sosial, media, dan seluruh kehidupan rakyat. Informasi-informasi yang ada dalam setiap media Korut diatur oleh PBK. Bagian tertinggi dalam pembuatan kebijakan Korut berasal dari Komite Sentral Partai Buruh Korea dan tiga lembaga bawahannya yaitu Biro Politik atau Politbiro, Komisi Kontrol, dan Biro Kebijakan Eksekutif, yang juga mengontrol pengawasan dan menunjuk anggota partai, kabinet, dan militer.

Departemen Bimbingan Organisasi Komite Sentral (OGD) dan Departemen Propaganda dan Agitasi adalah badan partai yang sangat berpengaruh. Departemen pemerintahan mengajukan rancangan kebijakan kepada masing-masing entitas Komite Sentral partai. Komite Sentral kemudian akan mempertimbangkan, mengubah, serta menyetujui inisiatif tersebut. Proses ini sebagai cara partai untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan.

Hal ini jika dikaitkan dengan keputusan Korut untuk ikut serta dalam ajang Olimpiade Pyeongchang 2018 dari empat jenis *policy influencers* tersebut, tentunya birokratik adalah satu-satunya yang mendominasi proses pengambilan keputusan tersebut yang mana keputusan Kim Jong Un telah melalui dan mendapatkan dukungan dari anggota birokratik Korut yaitu PBK. Kim Jong Un sebagai pemimpin tertinggi Korut memiliki hak penuh untuk mengambil segala tindakan dan memutuskan berbagai kebijakan terkait negaranya melalui PBK yang menjadi pendukung dari seluruh kebijakan yang diambil dan yang akan memberikan berbagai pengaruh serta masukan dalam proses pengambilan kebijakan.

Untuk publik atau masyarakat Korut sendiri sangat jarang bahkan tidak pernah terlibat dalam setiap urusan politik di negara tersebut. Begitu pula dengan media massa yang hanya menjadi alat untuk melakukan propaganda negara terhadap masyarakatnya guna memperkuat rezim yang berkuasa, untuk menyiarkan kegiatan-kegiatan, berita maupun informasi terkait Korut yang dapat menumbuhkan kebanggaan dan kecintaan masyarakat kepada negara serta pemimpin tertinggi negara.

Keputusan Kim Jong Un untuk ikut berpartisipasi dalam Olimpiade Pyeongchang 2018 tidak terlepas dari masukan dan pengaruh aktor-aktor terpercaya dalam birokrasinya yang kemudian diputuskan secara resmi melalui proses pengambilan keputusan yang dilakukan PBK selaku partai yang mendukung setiap kebijakan pemerintah Korut. Terkait aktor-aktor dalam birokrasi yang memiliki peran penting dan mempengaruhi keputusan untuk ikut serta dalam



Olimpiade Pyeongchang 2018 diantaranya adalah Ri Son Gwon (Ketua Komite Reunifikasi Damai Negara) adalah tokoh penting dalam perundingan yang diadakan antara Korut dan Korsel terkait keikutsertaan Korut dalam Olimpiade Pyeongchang 2018. Dalam pertemuan yang diadakan di bulan Januari 2018 tersebut ia secara langsung menyatakan harapannya agar keikutsertaan Korut tersebut dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea dan dapat menjadi hadiah terbaik di awal tahun 2018.

Selain itu ada pula Choe Hwi selaku Menteri Olahraga dan tokoh kebudayaan Korut yang selalu menginisiasi hubungan Korut dan Korsel melalui olahraga. Aktor-aktor ini pun kemudian ditunjuk sebagai delegasi pejabat tinggi Korut untuk menghadiri pembukaan Olimpiade Pyeongchang 2018 bersama 25 orang pejabat lainnya.

#### **b. Kapabilitas ekonomi dan militer**

Kemampuan ekonomi dan militer suatu negara adalah salah satu *bargaining position* yang paling berpengaruh terhadap negara lain. Ketika perekonomian dan militer suatu negara berada pada level yang baik, maka kemampuan negara tersebut untuk menyeimbangkan dan mewujudkan kepentingan nasionalnya semakin tinggi atau sebaliknya. Ketika kapabilitas ekonomi dan militer suatu negara sedang tidak dalam kondisi yang baik, maka hal tersebut dapat menjadi pertimbangan utama bagi pembuat kebijakan dalam mengambil kebijakan tersebut.

Keputusan untuk ikut serta dalam Olimpiade tersebut tentunya didasarkan pada kondisi internal dari Korut itu sendiri. Jika dilihat dari kepentingan nasional Korut yang telah dijelaskan sebelumnya, terkait kapabilitas ekonomi dan militer bahwa

secara tidak langsung melalui partisipasi Korut di Olimpiade Pyeongchang 2018 ini bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan dan menjalin kembali kerjasama ekonomi dengan Korsel. Kerjasama ini akan membantu memulihkan keadaan dan kondisi ekonomi Korut yang saat ini sedang mengalami ketidak stabilan akibat dari sanksi-sanksi yang saat ini sedang menjerat Korut.

Meskipun Korut tidak pernah mempublikasikan mengenai perkembangan ekonominya secara langsung dan resmi melalui pemerintahan negaranya, namun negara tetangganya yaitu Korsel secara rutin disetiap tahunnya mengeluarkan laporan estimasi pertumbuhan ekonomi Korut melalui Bank Sentral Korsel.

Negara tersebut mengalami penyusutan ekonomi yang tajam dalam dua dasawarsa terakhir di tahun 2017. Penyusutan yang terjadi pada perekonomian Korut ini merupakan yang terbesar sejak musibah kelaparan yang dialami Korut pada 1997. PDB Korut 2017 mengalami penyusutan sebesar 3,5 persen dari tahun 2016, produksi industri Korut menurun 8,5 persen, hasil produksi dari sektor pertanian dan industri konstruksi juga ikut menyusut sebesar 1,3 persen dan 4,4 persen. Penyusutan tersebut terkait dengan sanksi ekonomi internasional yang dijatuhkan kepada Korut atas uji coba senjata nuklirnya.

Berbagai sektor yang menjadi sumber modal bagi Korut untuk melakukan kegiatan proliferasi senjata nuklir menjadi sasaran, diantaranya adalah penutupan badan-badan usaha asal Korut, pembatasan bahkan penghentian kegiatan ekspor-impor hasil produksi atau bahan mentah untuk produksi dengan Korut diberbagai sektor (tekstil,

manufaktur, mineral, minyak, agrikultur, makanan).

### **c. Konteks internasional**

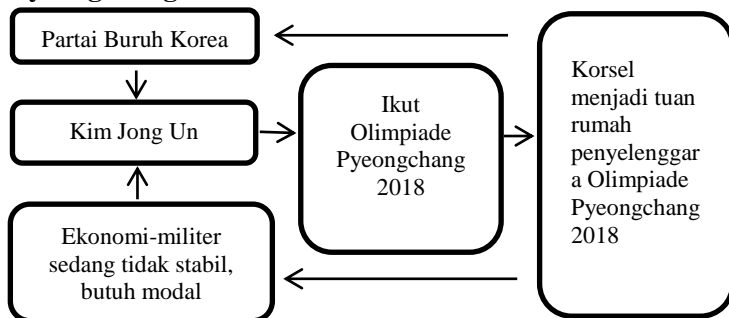
Konteks internasional mengarah pada kondisi lingkungan di luar dari teritori negara. Suatu negara, dalam proses pengambilan keputusan luar negerinya akan mempertimbangkan keadaan di luar teritorinya atau lingkungan internasional. Biasanya yang paling utama adalah hubungan dan keadaan di negara-negara tetangganya yang secara geografis memiliki kedekatan.

Korsel adalah pengaruh paling utama dan penting terhadap keputusan Korut untuk ikut serta dalam Olimpiade Pyeongchang 2018. Secara geografis dan sejarah Korsel dan Korut memiliki kedekatan, meskipun hubungan keduanya sejak terpisahnya Semenanjung Korea menjadi dua hingga kini belum berada pada titik damai. Atas keberhasilan Korsel keluar sebagai negara tuan rumah penyelenggara Olimpiade Pyeongchang 2018, tentunya Korsel menjadi sorotan di panggung internasional sebagai negara yang akan menyelenggarakan ajang olimpiade olahraga bergengsi tersebut. Ini akan meningkatkan profil Korsel, menaikkan prestise nasional negaranya karena keunggulan, kemegahan, kecanggihan, kemewahan yang disuguhkan dan dipersembahkan Korsel dalam Olimpiade Pyeongchang 2018. Dalam hal ini Korut tidak ingin kalah dari Korsel untuk menuai perhatian dari masyarakat internasional. Korut tetap ingin menunjukkan kekuatan dan eksistensi negaranya dipanggung internasional melalui keikutsertaannya tersebut, ingin mendapatkan sorotan dari publik internasional layaknya Korsel. Korut tidak ingin tenggelam dari sorotan internasional dalam

euforia yang bergejolak di Korsel dalam perayaan olimpiade tersebut. Sehingga Korut memutuskan untuk ikut serta dalam Olimpiade Pyeongchang 2018.

Dari penjelasan di atas berikut adalah bagan yang akan merinci hal-hal yang mempengaruhi proses dalam pengambilan keputusan Korut untuk ikutserta dalam Olimpiade Pyeongchang 2018 berdasarkan model pengambilan keputusan luar negeri oleh Coplin.

### Bagan 1.2 Proses Pengambilan Keputusan Korut dalam Mengikuti Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018



Sumber: dari berbagai sumber

### E. Hipotesa

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dapat ditarik kesimpulan sementara sebagai berikut: faktor yang mendorong Korea Utara untuk ikut berpartisipasi di ajang Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018 yang diselenggarakan di Korea Selatan adalah :

1. Adanya dukungan langsung dari birokrasi dalam proses pengambilan keputusan;
2. Membentuk citra baik bagi Korut (*image building*);
3. Mendapatkan kembali peluang kerjasama dengan Korsel.

## **F. Jangkauan Penelitian**

Penulis membatasi ruang lingkup skripsi ini dari tahun 2015 sampai 2018 agar tidak terjadi pembahasan yang meluas. Hal ini dikarenakan di mulai dari tahun 2015 terjadi pertemuan langka yang merupakan tatap muka pertama kali antara perwakilan dari kedua negara tersebut untuk menyepakati pengurangan konfrontasi militer antara keduanya semenjak ketegangan yang terjadi pada Agustus 2015. Kemudian hal tersebut mencapai puncaknya pada tahun 2018 yang mana Korut memutuskan untuk melakukan perdamaian dengan Korsel melalui cara yang tidak biasa dari apa yang sering dilakukan oleh Korut. Hal tersebut langsung disampaikan oleh pemimpin tertinggi Korut, Kim Jong Un melalui pidato tahun baru kepresidenannya pada tahun 2018. Namun penulis tidak akan mengesampingkan data-data yang di luar jangkauan tersebut.

## **G. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan dari berbagai literature, buku, jurnal, kliping, makalah, serta penelusuran dari berbagai situs-situs internet dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan masalah tersebut.

## **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

**BAB I:** Pada Bab ini terdapat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan skripsi.

- BAB II:** Pada Bab ini akan membahas mengenai sejarah keikutsertaan Korut dalam berbagai olimpiade, serta memaparkan bagaimana hubungan antara Korut dan Korseul dalam dan pasca berbagai olimpiade yang diikuti bersama yang sekaligus akan menjelaskan secara singkat mengenai dinamika hubungan kedua negara tersebut.
- BAB III:** Pada Bab ini akan menjabarkan faktor-faktor yang mendorong partisipasi Korut dalam Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018. Sub babnya akan diawali dengan gambaran terkait keikutsertaan Korut dalam Olimpiade Pyeongchang 2018 dan analisa kepentingan nasional Korut.
- BAB IV:** pada Bab ini nantinya berisi penutupan yang berupa kesimpulan dari permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.